

## **BAB II**

# **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### **2.1 Kajian Pustaka**

#### **2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

##### **2.1.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah sistem informasi yang dapat membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangan daerah. Sebelumnya, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membutuhkan waktu yang sangat lama, dengan dokumen yang banyak. Kini dengan adanya SAKD, waktu penyusunannya menjadi lebih singkat dan tidak membutuhkan dokumen dengan jumlah yang terlalu banyak karena dibantu oleh otomatisasi dan sistem digital.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang dimaksud dengan sistem akuntansi keuangan daerah adalah:

“Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah”.

Menurut Rasdianto (2013:6) yang dimaksud dengan sistem akuntansi keuangan daerah adalah:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).”

Menurut Abdul Halim (2012:43), yang dimaksud dengan sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan”.

Menurut Erlina Rasdianto (2013:6) sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak internal dan eksternal pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

### **2.1.1.2 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menyebutkan bahwa:

“Tujuan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan itu sendiri.”

### **2.1.1.3 Prosedur dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Nunuy Nur Afiah (2009:18) pengertian prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah:

“Dalam sistem akuntansi keuangan daerah, contoh input-nya adalah Bukti Memorial, Surat Tanda Setoran, dan Surat 26 Perintah Membayar. Prosesnya adalah menggunakan catatan yang meliputi Buku Jurnal Umum, Buku Jurnal Penerimaan Kas, Buku Jurnal Pengeluaran Kas, Buku Besar, dan Buku Besar Pembantu. Output sistem akuntansi keuangan daerah berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). “

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD.

Prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah pada sektor publik terdiri dari beberapa prosedur menurut Abdul Halim (2012:84) terdiri dari:

1. “Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi Selain Kas
4. Prosedur Akuntansi Aset”.

Adapun penjelasan dari Prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah pada sektor publik adalah sebagai berikut:

#### 1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas. Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur akuntansi penerimaan kas, terdiri atas:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk menetapkan retribusi atas wajib retribusi.

- b. Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang diselenggarakan bendahara penerimaan untuk menyetor penerimaan daerah atau PPKSKPD untuk dijadikan dokumen dalam menyelenggarakan akuntansi pada SKPD.
- c. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah.
- d. Nota kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah.

## 2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas. 27 Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur akuntansi pengeluaran kas, terdiri atas:

- a. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi.
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan surat perintah pencairan dana yang akan diterbitkan oleh bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah.
- c. Kuitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran.
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah untuk mencairkan uang pada bank yang telah ditunjuk.

- e. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah.
- f. Nota debit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah.

### 3. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian selain kas. Prosedur akuntansi selain kas meliputi transaksi atau kejadian sebagai berikut:

- a) Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ) merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan.
- b) Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan yang telah dicatat dalam buku jurnal dan telah di-posting ke buku besar.
- c) Penerimaan/pemberian hibah selain kas merupakan penerimaan/ pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD, yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah.
- d) Pembelian secara kredit merupakan transaksi pembelian barang/aset tetap yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang.
- e) Retur pembelian kredit merupakan pengembalian barang/aset tetap yang telah dibeli secara kredit. - Pemindah-tanganan atas aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas merupakan pemindah-tanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas. 28

- f) Penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (ruilslaag) dengan pihak ketiga.

Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur selain akuntansi, terdiri atas:

- a. Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ).
- b. Berita acara penerimaan barang.
- c. Surat keputusan penghapusan barang.
- d. Surat pengiriman barang.
- e. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD/SKPKD)
- f. Berita acara serah terima barang.

#### 4. Prosedur Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan.

Dokumen yang digunakan:

- a. Berita acara penerimaan barang.
- b. Berita acara serah terima barang.
- c. Berita acara penyelesaian pekerjaan.

### **2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

#### **2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas**

Menurut Adisasmita (2011:89):

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”

Sedangkan menurut Bastian (2010:11):

“Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat yang memberikan amanah kepadanya, berdasarkan system pemerintahan yang berlaku.”

Sedangkan menurut Djalil (2014: 63) definisi akuntabilitas adalah “Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.”

Definisi akuntabilitas menurut Lloyd, et al dalam A Ebrahim, (2010) adalah sebagai berikut:

*“The processes through which an organization makes a commitment to respond to and balance the needs of stakeholders in its decision making processes and activities, and delivers against this commitment.”*

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat yang memberikan amanah kepadanya

### **2.1.2.2 Tujuan Akuntabilitas**

Pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Penjelasan tersebut sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:23) bahwa:

“Akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*prinsipal*)”.

Dari tujuan akuntabilitas yang telah dikemukakan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan

### **2.1.2.3 Tipe-Tipe Akuntabilitas**



Tipe Akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa tipe diantaranya dibagi menjadi dua bagian menurut Ihyaul Ulum (2010:42) yaitu :

1. Akuntabilitas Internal
2. Akuntabilitas Eksternal

Berikut ini penjelasan dari beberapa macam tipe akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Internal

Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat/petugas publik baik individu/kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan mengenai perkembangan kinerja/hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan akuntabilitas internal pemerintah tersebut, telah diamanatkan dalam instruksi 28 Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Akuntabilitas Eksternal

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

#### **2.1.2.4 Jenis-jenis Akuntabilitas**

Akuntabilitas Publik terdiri dari dua macam menurut Mahmudi (2015:9) yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*),
2. Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*).

Adapun penjelasan dari dua macam akuntabilitas publik diatas adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya 29

## 2. Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas Horisontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Sedangkan menurut Ihyaul Ulum (2010:41) mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Keuangan
2. Akuntabilitas Kinerja

Berikut penjelasan dua jenis akuntabilitas adalah sebagai berikut :

### 1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

- a. Integritas Keuangan
- b. Pengungkapan

### 2. Akuntabilitas kinerja Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban mengenai:

- a. Kinerja organisasi
- b. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

#### **2.1.2.5 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ini meliputi:

“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD”.

#### 2.1.2.6 Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah menurut Chabib dan Rohcmansjah (2010:10) meliputi:

1. Akuntabilitas
2. *Value for money*
3. Kejujuran dalam mengelola keuangan public
4. Transparansi
5. Pengendalian

Dibawah ini adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan:

##### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yangtelah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara *vertikal* maupun *horizontal* kepada masyarakat.

##### 2. *Value for Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi

yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*, yang mencakup:

a. Ketidakhematan Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

b. Ketidakefektifan Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai

### 3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

### 4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakankebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

### 5. Pengendalian

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkindicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan, yang mencakup:

#### **2.1.2.7 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**

Menurut Adisasmita (2011:81):

“Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran dalam pertanggungjawaban ini yaitu berupa laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang 33 berlaku mencakup penerimaan, penyimpangan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.”

Sedangkan menurut Mahmudi (2007:11):

“Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomis, efisiensi dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.”

Akuntabilitas finansial menurut Lewis dalam jurnal Mgadla Xaba and Duminase Ngubane

(2010) adalah sebagai berikut

*“Financial accountability describes the systems and procedures used to keep track of financial and monetary transactions that take place inside an organisation and therefore it is a system of recording, classifying and summarising information for various purposes.*

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan adalah pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik mengenai integritas keuangan, pengungkapan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berupa laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait.

#### **2.1.2.8 Pengukuran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**

Mahmudi (2010), *value for money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik dimana *value for money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. *Value for*

*money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu:

1. Ekonomi
2. Efisiensi
3. Efektivitas

Penjelasan dari tiga elemen diatas, yaitu

- a. Ekonomi terkait dengan pengkonversian *input* primer berupa sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi *input* sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya *input* hendaknya diperoleh dari dengan harga lebih rendah (*spending less*), yaitu harga yang mendekati pasar. Secara matematis, ekonomi merupakan perbandingan antara *input* dengan nilai rupiah untuk memperoleh *input* tersebut.
- b. Jika ekonomi hanya berbicara mengenai *input*, yaitu bagaimana memperoleh *input* dengan biaya atau harga lebih rendah, maka efisiensi berbicara mengenai *input* dan *output*. Efisiensi terkait dengan hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input*. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*).
- c. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif

organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*.

### **2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah**

Kinerja berasal dari kata performance yang artinya *manner of functioning*, artinya sejauhmana/bagaimana suatu organisasi ataupun individu berfungsi sesuai dengan posisi dan/atau tugasnya. Dalam kaitannya dengan lingkup kerja Pemerintah Daerah, kinerja pemerintah daerah berarti bagaimana atau sejauhmana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan-urusan daerah tersebut.

Menurut Nurlaila (2010:71) pengertian kinerja, yaitu :

“Pengertian kinerja adalah performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses.”

Menurut Moehariono (2012:95) pengertian kinerja adalah

“Kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi.”

Menurut Mohamad Mahsun (2012: 141) mendefinisikan kinerja sebagai berikut:

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila anggota/karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi baik dan berkualitas juga”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seorang/kelompok terhadap pelaksanaan kegiatan program dalam periode tertentu sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

### **2.1.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah**

Tujuan Pengukuran kinerja menurut I Gusti Agung Rai (2011:18) adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Akuntabilitas Publik
2. Mengetahui Tingkat Ketercapaian Tujuan Organisasi.
3. Memperbaiki Kinerja Periode – Periode Berikutnya
4. Menyediakan Sarana Pembelajaran Pegawai.

Menurut Mardiasmo (2009:121) mendefinisikan Sistem Pengukuran kinerja sektor publik sebagai berikut :

“Suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi menilai alat ukur material dan nonimaterial.”

Sedangkan menurut Adisasmita (2011:121) mendefinisikan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagai :

“Suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.”

### **2.1.3.3 Manfaat Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah**

Menurut Mohamad Mahsun (2012:146) manfaat pengukuran Kinerja antara lain :

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.



6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Sedangkan manfaat pengukuran kinerja sektor publik menurut Ihyaul Ulum (2010), antara lain:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward & punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif

#### **2.1.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah**

Menurut Keith Davis dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2010:67) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi kinerja antara lain :

- a) Faktor Kemampuan
- b) Faktor Motivasi

Adapun penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja diatas

Adalah

- a. Faktor kemampuan

Secara psikologis kemampuan (*ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

b. Faktor motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (*situation*) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal.

### 2.1.3.5 Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mohamad Mahsun, (2012:208):

“Pengukuran kinerja pemerintah daerah (Pemda) harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan nonkeuangan. pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing Dinas yang telah diberi wewenang mengelola sumberdaya sebagaimana bidangnya, sistem pengukuran dengan mengelola sumberdaya sebagaimana bidangnya. Sistem pengukuran dengan pendekatan *balanced scorecard*, *sosial benefit cost analysis*, dan *value for money* bisa memberikan hasil pengukuran kinerja yang lebih obyektif karena selain mempertimbangkan aspek finansial dan bersifat *direct* serta *tangible* juga memperhatikan aspek nonfinansial yang bersifat *indirect* dan *intangible*“

Menurut Mohamad Mahsun (2012:148), karakteristik kinerja pemerintah daerah yaitu :

1. Masukan (*Input*)
2. Proses (*Process*)
3. Keluaran (*Output*)
4. Hasil (*Outcomes*)
5. Manfaat (*Benefit*)
6. Dampak (*Impact*)

Penjelasan dari jenis-jenis karakteristik diatas adalah :

1. Masukan (*Input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya :
  - a. Jumlah dana yang dibutuhkan

- b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan.
  - c. Jumlah infrastruktur yang ada
  - d. Jumlah waktu yang digunakan.
2. Proses (*Process*). Dalam indikator ini, organisasi/ instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi. Misalnya :
- a. Ketaatan pada peraturan perundangan.
  - b. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa
3. Keluaran (*Output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Misalnya :
- a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
  - b. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
4. Hasil (*Outcome*), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/ instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam 45 bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak, misalnya :
- a. Tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.
  - b. Produktivitas para karyawan atau pegawai.

5. Manfaat (*Benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.

Misalnya :

- a. Tingkat kepuasan masyarakat
  - b. Tingkat partisipasi masyarakat.
6. Dampak (*Impact*), pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya:
- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - b. Peningkatan pendapatan masyarakat.

#### 2.1.4 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam melakukan penelitian ini, akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang penulis ringkas dalam tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

No	Nama peneliti dan tahun	Judul penelitian	Variable penelitian	Hasil penelitian
1.	Vivid Annisa (2017)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan <i>Good Governance</i> Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)	<p><b>Variable Independen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</li> <li>2. Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>3. <i>Good Governance</i></li> </ol> <p><b>Variable Dependen:</b> Kinerja Pemerintah Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan <i>Good Governance</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja SKPD Kota Pekanbaru.</li> <li>2. Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD Kota Pekanbaru.</li> </ol>

				3. <i>Good Governance</i> berpengaruh terhadap kinerja SKPD Kota Pekanbaru.
2.	Izmavita Sarah (2016)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Instansi pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat	<b>Variable Independen:</b> 1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 2. Kejelasan Sasaran Anggaran  <b>Variable Dependen:</b> Kinerja Instansi Pemerintah	1. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan maka Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kejelasan Sasaran Anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat 3. Secara parsial Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kejelasan Sasaran Anggaran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Instansi
3	Abdul Rohman (2009)	<i>Influence of The Implementation of The Accounting System, Management of Regional Finance on The Supervisory Function and Performance of Local Governments (Survey of Central Java Local Government)</i>		Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi dan Kinerja Penyelamat Pemerintah Daerah (Survei Pemerintah Daerah Jawa Tengah)

4	Askam Tusikal (2008)	<i>Influence of Understanding of The Financial Accounting System and Financial Management of The Performance of The Local Government</i>		Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh mengenai Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Manajemen Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
5	Tari Mellisa Rafar, Dr. rer. pol. Heru Fahlevi, SE, M.Sc, dan Dr. Hasan Basri, SE, M.Com, Ak (2015)	Pengaruh kompetensi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten pemerintah aceh utara)	<b>Variable Independen:</b> 1. Kompetensi pengelolaan keuangan 2. Akuntabilitas <b>Variable Dependen:</b> Kinerja pengelolaan keuangan	Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, kompetensi pengelola keuangan dan akuntabilitas baik secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Aceh Utara
6	Achmad Faisal Daulay, Muhammad Arfan, Hasan Basri (2015)	Pengaruh kejelasan sasaran anggaran akuntabilitas keuangan dan pengawasan intern terhadap efektivitas pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah kota Lhokseumawe	<b>Variabel Independen:</b> 1. Kejelasan sasaran anggaran 2. akuntabilitas keuangan 3. Pengawasan intern <b>Variabel Dependen:</b> Efektivitas pengelolaan keuangan satuan Kerja perangkat daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas keuangan, dan pengawasan intern secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan SKPD Kota Lhokseumawe
7	Nopriansyah putra, Erlina, dan Tapi anda sari (2016)	Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi	<b>Variable Independen:</b> 1. Pengelolaan keuangan daerah 2. Akuntabilitas 3. Transparansi	1. Berdasarkan hasil analisis secara simultan maka pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi secara

		terhadap kinerja pemerintah daerah dengan pengawasan sebagai variable moderating pada Provinsi Sumatera Utara	4. Pengawasan keuangan <b>Variable Dependen:</b> Kinerja pemerintah daerah	simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2. Secara parsial pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel kinerja pemerintah daerah, sedangkan variable transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. 3. Berdasarkan hasil pengujian moderating dengan uji residual Pengawasan tidak terbukti sebagai variabel moderating yang dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
8	Fyneface N. Akani (2017)	<i>Financial accountability and performance of local governments in rivers state, Nigeria</i>	<b>Variabel Independen:</b> 1. Transparansi 2. Akuntabilitas keuangan <b>Variabel Dependen:</b> Kinerja pemerintah daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan integritas dalam akuntabilitas keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja pemerintah daerah

### 2.1.5 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

1. Vivid Anissa (2017) dengan judul Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah mempunyai perbedaan dengan penulis yaitu variable independen mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* lokasi penelitian dan tahun penelitiannya sedangkan persamaan penulis dengan peneliti sebelumnya adalah dari variabel independen mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan variable dependen yaitu kinerja Pemerintah Daerah.
2. Izmavita Sarah (2016) dengan judul Pengaruh Keahlian Pemakai Komputer, Kenyamanan Fisik, Kesesuaian Tugas, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mempunyai perbedaan dengan penulis yaitu tempat penelitian dan waktu penelitiannya sedangkan persamaan penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu variable dependen mengenai kinerja instansi
3. Rohman, Abdul. (2009) dengan judul *Influence of The Implementation of The Accounting System, Management of Regional Finance on The Suervisory Function and Performance of Local Governments (Survey of Central Java Local Government)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi dan Kinerja Penyelamat Pemerintah Daerah (Survei Pemerintah Daerah Jawa Tengah).
4. Tusikal, Askam. (2008) dengan judul *Influence of Supervison, Understanding of The Financial Accounting System and Financial Management of The Performance of The Local Government*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh mengenai



Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Manajemen Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

5. Tari Mellisa Rafar, Dr. rer. pol. Heru Fahlevi, SE, M.Sc, dan Dr. Hasan Basri, SE, M.Com, Ak (2015) dengan judul Pengaruh kompetensi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten pemerintah aceh utara) mempunyai perbedaan dengan penulis yaitu pada variable independen mengenai kompetensi pengelolaan dan variable dependen mengenai kinerja pengelolaan keuangan, tempat penelitian dan waktu penelitian sedangkan persamaan penulis dengan peneliti sebelumnya mengenai akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah
6. Achmad Faisal Daulay, Muhammad Arfan, Hasan Basri (2015) dengan judul Pengaruh kejelasan sasaran anggaran akuntabilitas keuangan dan pengawasan intern terhadap efektivitas pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah kota Lhokseumawe mempunyai perbedaan dengan penulis yaitu pada variable independen mengenai kejelasan sasaran anggaran dan variable dependen mengenai efektivitas pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah, lokasi penelitian dan waktu penelitian sedangkan persamaan penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu pada variabel independen mengenai akuntabilitas keuangan
7. Nopriansyah putra, Erlina, dan Tapi anda sari (2016) dengan judul Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah dengan pengawasan sebagai variable moderating pada Provinsi Sumatera Utara mempunyai perbedaan dengan penulis yaitu tempat penelitian dan waktu penelitiannya

sedangkan persamaan penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu variable independen mengenai akuntabilitas dan variable dependen mengenai kinerja pemerintah daerah.

8. Fyनेface N. Akani (2017) dengan judul *Financial accountability and performance of local goverments in rivers state, Nigeria* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja pemerintah daerah

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**

Menurt Halim (2012:35) dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana. Dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diharapkan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai.

Sedangkan Teori Hafiz (2009:42) menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan melalui proses akuntansi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Guna dapat menghasilkan laporan keuangan yang semakin baik (tantangan) dibutuhkan tenaga-tenaga akuntansi terampil pada pemerintah daerah, hal ini dapat dilakukan melau kegiatan bimbingan teknis akuntansi bagi pegawai pemerintah daerah yang ditugaskan sebagai pengelola keuangan atau melalui rekrutmen pegawai baru yang memiliki kemampuan akuntansi keuangan daerah. Tidak hanya tenagatenaga akuntansi terampil tersebut, juga dibutuhkan adanya sistem dan prosedur pembukuan yang memadai dan kebijakan akuntansi sebagai pedoman pegawai dalam mengelola keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Tusikal, Askam. (2008) dengan judul *Influence of Supervision, Understanding of The Financial Accounting System and Financial Management of The Performance of The Local Government*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh mengenai Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Manajemen Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Vivid Annisa (2017), Izmavita Sarah (2016) dan Abdul Rohman (2009).

### **2.2.2 Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah**

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dalam peraturan perundang yang berlaku yang mencakup penerimaan. Penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP:2000 dalam Abdul Halim, 2012).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Auditya et al., (2013), Wiguna et al., (2015) dan Asrida (2012) menyatakan bahwa:

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah, maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah”.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fyeface N. Akani (2017) menyatakan bahwa:

*“Transparency and integrity in financial accountability of local governments have a significant relationship with local government performance.”*

“Transparansi dan integritas dalam akuntabilitas keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja pemerintah daerah.”

Akuntabilitas finansial/keuangan adalah pertanggungjawaban Lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomis, efektif dan efisien, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi

### **2.2.3 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Kinerja Pemerintah Daerah akan tercapai dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, artinya sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang dicapai. Mardiasmo (2009:65)

Menurut Mardiasmo (2009:84) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berhubungan terhadap kinerja yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail Molamahu (2015) yang berjudul Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah

daerah. Hasil studi ini menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Vivid Annisa (2017), Izmavita Sarah (2016) dan Abdul Rohman (2009).

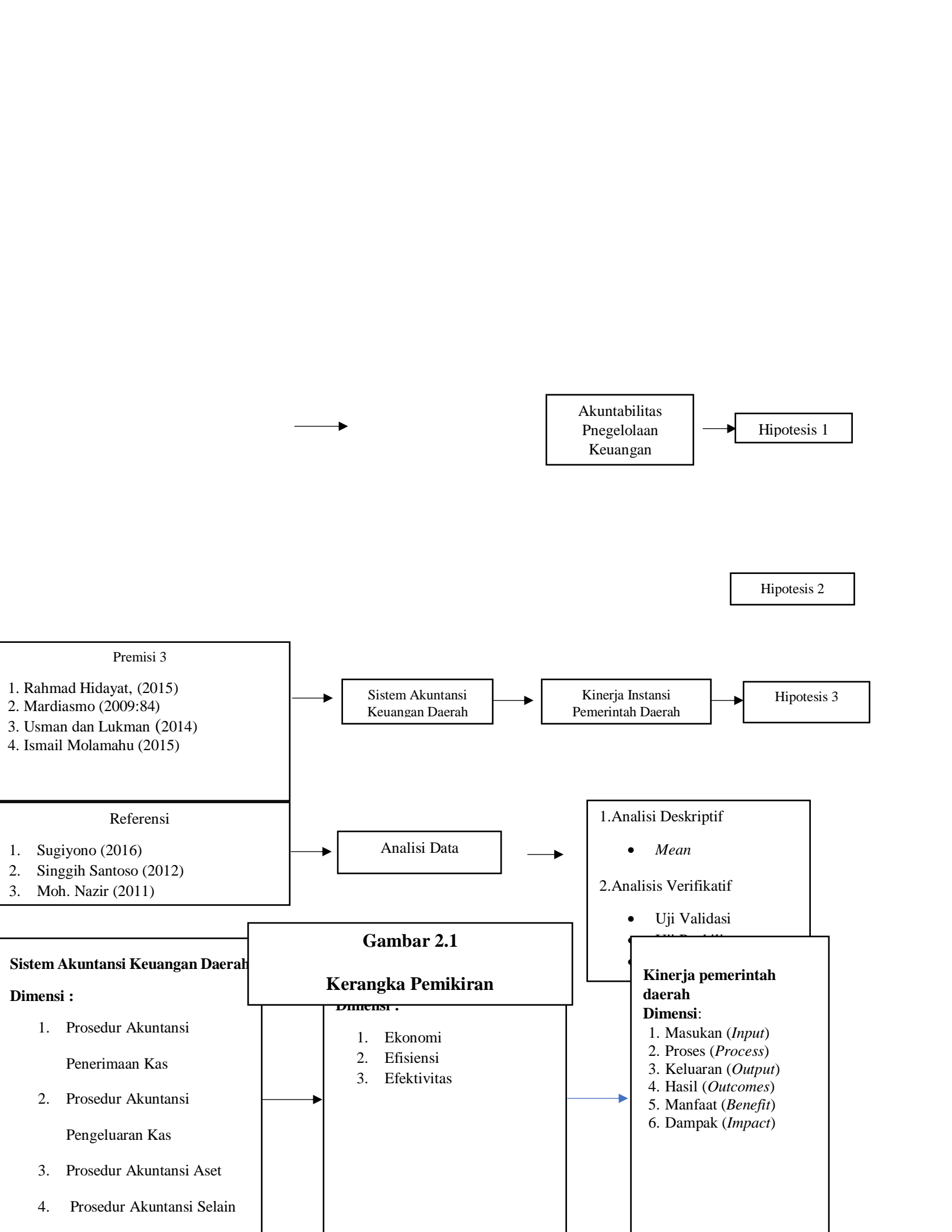
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Rasdianto (2013:6), Abdul Halim (2012:43), Erlina Lasdianto (2013:6)  
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan : Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Adisasmita (2011:89), Bastian (2010:11), Mahmudi (2010:23), Abraham, (2010)  
Kinerja Pemerintah Daerah : Nurlaila (2010:71), Moeheriono (2012:95), Mohamad Mahsun (2012: 141)

Referensi

1. Vivid Annisa(2017)
2. Izmavita Sarah(2016)
3. Abdul Rohman(2009)
4. Askam Tusikal(2008)
5. Tari Mellisa Rafar, Dr. rer. pol. Heru Fahlevi, SE, M.Sc, dan Dr. Hasan Basri,

Data Penelitian

1. Penelitian Pada Pemda di Bandung Raya
2. 65 populasi timanggaran di BPKAD
3. Faktor – Faktor yang mempengaruhi



## **2.2 Paragnima Penelitian**

## **2.4 Hipotesis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2017:93) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan landasan teori kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini, rumusan hipotesis penelitian yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

**Hipotesis 1 :** Terdapat pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

**Hipotesis 2 :** Terdapat pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah daerah

**Hipotesis 3 :** Terdapat pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah daerah

**Hipotesis 4 :** Terdapat pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah daerah melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan